



02

GOVERNMENTTODAY

Perhatian! Purbaya Tak Akan Penuhi Semua Usulan Tambah Anggaran Rp984 T

04

NUSANTARA

Pesawat AMA Dibakar di Yahukimo Pilot Tewas, 7 Penumpang Selamat Dievakuasi

10

LISTSTYLE

Polkadot Is Back! Padu Padan Hijab dengan Kemeja Motif Bintik yang Stylish

JEJAK JENDERAL MENGAKALI OMPRENG GIZI

Brigjen Pol. Lalu Iwan Resmi Tersangka, Kolonel TNI Aktif Masih Saksi

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi andalan pemerintah untuk menekan angka stunting justru tercoreng dugaan korupsi. Penyidikan Kejaksaan Agung kini menyeret Brigjen Pol. Lalu Muhammad Iwan Mahardan, yang menjabat Sekretaris Deputy Bidang Promosi dan Kerja Sama Badan Gizi Nasional (BGN) sekaligus merupakan perwira tinggi aktif Polri. Ia ditetapkan sebagai tersangka ketujuh dalam perkara dugaan korupsi tata kelola MBG yang diduga menyebabkan kerugian negara hingga Rp1,98 triliun itu. Langkah ini sekaligus membuka dugaan keterlibatan seorang perwira TNI aktif juga. Disebut, Brigjen Pol. Lalu Muhammad berperan sebagai aktor intelektual yang memonopoli pengadaan wadah makanan (food tray/ompreng). Caranya dengan memerintahkan pendirian perusahaan boneka untuk menjual ompreng tersebut kepada calon mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Memanfaatkan jabatannya, ia menetapkan harga secara sepihak dan menyalahgunakan wewenang dengan hanya memberikan persetujuan operasional titik layanan SPPG kepada mitra yang bersedia membeli wadah dari perusahaannya. Dia pun diduga meraup keuntungan pribadi berupa aliran dana (fee) dari setiap transaksi penjualan kelengkapan proyek nasional tersebut. **BACA HAL 11...**

Total harta
RP 4.44 MILIAR

Tanah dan Bangunan
Rp 1 Miliar

Alat Transportasi
Rp 250 Juta

Tanah dan Bangunan
Rp 1.81 Miliar

Kas dan Setara Kas
Rp 1.38 Miliar

Harta Kekayaan
Lalu Muhammad Iwan Mahardan

Lanjut di hal 11...

Brigjen Pol Lalu Muhammad Iwan Mahardan (LMI), tersangka ketujuh kasus dugaan korupsi program MBG. Foto: Istimewa

PERHATIAN! PURBAYA TAK AKAN PENUHI SEMUA USULAN TAMBAHAN ANGGARAN **RP984 T**

Pemerintah memastikan tidak akan mengakomodasi seluruh usulan tambahan anggaran kementerian dan lembaga (K/L) untuk Tahun Anggaran 2027 yang nilainya mencapai Rp984 triliun. Besarnya tambahan anggaran yang diajukan dinilai melampaui kemampuan fiskal pemerintah dan berpotensi mengganggu target defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang telah ditetapkan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan setiap usulan yang disampaikan kementerian dan lembaga akan dievaluasi secara menyeluruh sebelum dimasukkan ke dalam Rancangan APBN (RAPBN) 2027.

Pemerintah, kata dia, hanya akan mengakomodasi program-program yang benar-benar menjadi prioritas nasional dan sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

"Kita lihat mana yang pantas, mana yang nggak. Kita kan ada target defisitnya berapa (2,40 persen), selama defisit dipenuhi ya sudah. Tapi kelihatannya sih itu (kalau semua permintaan dipenuhi) di atas defisit yang ada," kata Purbaya kepada

wartawan di Kompleks Parlemen, Kamis (2/7/2026).

Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki ruang fiskal yang cukup untuk memenuhi seluruh tambahan anggaran yang diajukan. Dalam penyusunan RAPBN 2027, pemerintah tetap berkomitmen menjaga disiplin fiskal dengan mempertahankan defisit APBN sesuai batas yang telah disepakati dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF).

Saat ditanya apakah besaran tambahan anggaran yang nantinya disetujui akan jauh lebih kecil dibanding usulan hampir Rp1.000 triliun, Purbaya kembali memastikan

seluruh permintaan tersebut tidak akan dipenuhi.

"Mungkin kita lihat, nggak akan sampai semuanya. Pasti nggak semuanya akan dipenuhi," ujarnya.

Pemerintah sebelumnya mengusulkan defisit APBN 2027 berada pada kisaran 1,8 persen hingga 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Rentang tersebut menjadi salah satu acuan utama dalam menentukan besaran belanja negara sehingga ruang untuk menambah anggaran kementerian dan lembaga relatif terbatas.

Usulan tambahan anggaran sebesar Rp984 triliun berasal dari hasil pembahasan antara komisi-komisi DPR dengan kementerian dan lembaga mitra kerja. Seluruh usulan tersebut kemudian dikompilasi oleh Badan Anggaran (Banggar) DPR RI untuk disampaikan kepada pemerintah sebagai bahan penyusunan RAPBN 2027.

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan tambahan

anggaran tersebut berada di luar pagu indikatif belanja kementerian dan lembaga tahun 2027 yang telah ditetapkan sebesar Rp1.389,84 triliun.

"Akan kami serahkan usulan dari berbagai pembahasan yang sudah disepakati antara komisi dengan mitra masing-masing. Pagunya Rp1.389,84 triliun. Usulan tambahannya Rp984 triliun," kata Said dalam rapat kerja Banggar DPR.

Jika seluruh usulan tersebut dikabulkan pemerintah, total belanja kementerian dan lembaga pada 2027 akan melonjak menjadi sekitar Rp2.373,84 triliun. Angka tersebut meningkat sekitar Rp863 triliun atau lebih dari 57 persen dibandingkan pagu belanja kementerian dan lembaga dalam APBN 2026 yang sebesar Rp1.510,5 triliun. (tin,bis,ist/dya)



Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.(Dok. PT Waskita Beton Precast Tbk)

Tolak IKN Jadi Pusat Finansial Internasional

Pemerintah memastikan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (RUU PFII) akan dipercepat dan ditargetkan rampung pada Juli 2026. Namun, di tengah percepatan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak menjadi pilihan utama sebagai lokasi pusat keuangan internasional karena dinilai belum memenuhi kebutuhan investor global.

Purbaya mengatakan pemerintah masih mengkaji sejumlah lokasi yang dinilai paling tepat untuk menjadi pusat finansial internasional.

Menurut dia, kawasan tersebut harus mampu memberikan kenyamanan sekaligus mendukung aktivitas pelaku usaha dan investor asing.

"Mungkin enggak, (IKN) terlalu sepi," kata Purbaya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (2/7). Ia menjelaskan, pemerintah masih membahas sejumlah alternatif lokasi. Salah satu daerah yang masuk dalam pembahasan adalah Bali, meski keputusan akhir belum ditetapkan.

"Kan masih dibahas ya, ada alternatif ya mungkin beberapa di Bali, tapi mungkin ada beberapa titik juga. Tapi yang jelas, kita akan cari tempat yang paling comfortable

untuk internasional investor," ujarnya.

Pernyataan tersebut berbeda dengan berbagai usulan yang sebelumnya mendorong IKN menjadi pusat aktivitas ekonomi baru Indonesia. Bagi pemerintah, pusat finansial internasional membutuhkan ekosistem bisnis yang telah matang, konektivitas global, kemudahan mobilitas, serta fasilitas penunjang yang mampu menarik lembaga keuangan dunia untuk ber Kantor dan bertransaksi di Indonesia.

Di sisi lain, pemerintah justru mempercepat pembahasan regulasi yang akan menjadi dasar hukum pembentukan kawasan tersebut. Purbaya mengungkapkan akan membahas RUU PFII dikebut dan ditargetkan disahkan dalam Rapat Paripurna DPR pada 21 Juli 2026.

"Memang dikebut ya Undang-undangnya. Tanggal 21 sudah selesai jadi UU," kata Purbaya.

Dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, pemerintah menilai Indonesia membutuhkan sebuah kawasan keuangan internasional yang memiliki berbagai kekhususan agar mampu bersaing dengan pusat-pusat keuangan global di kawasan Asia. (wid,ist/dya)

Usulan Tambahan Anggaran K/L Utama

- Kementerian Pertahanan (Kemhan): **Tambahan Rp195 triliun** (pagu awal Rp139 triliun).
- Polri: **Tambahan Rp66,1 triliun** (pagu indikatif Rp118 triliun).
- Kementerian Pekerjaan Umum (PU): **Tambahan hingga Rp121,34 triliun**; Bina Marga meminta Rp54 triliun.
- Kemendikdasmen: **Tambahan Rp40,75 triliun** untuk revitalisasi sekolah dan program prioritas.
- KKP: **Tambahan Rp30 triliun** untuk swasembada pangan, Kampung Nelayan Merah Putih, dan revitalisasi tambak.
- Kementan: **Tambahan Rp22,43 triliun** untuk program kedaulatan pangan.
- Kemenhub: **Tambahan Rp20,25 triliun** untuk belanja pegawai, keselamatan, dan konektivitas transportasi.
- Bapanas: **Tambahan Rp17,7 triliun**.
- Kemenkop: **Tambahan Rp1,34 triliun** untuk operasional 80.000 Koperasi Desa Merah Putih.
- KPK: **Tambahan Rp989 miliar**.
- Kementerian Investasi/Hilirisasi-BKPM: **Tambahan Rp578,9 miliar**.



Usai Pemangkasan Komisi Jadi 8%

ASOSIASI OJOL WADUL DPR **TARIF PERJALANAN TURUN**

Asosiasi Pengemudi Ojek Online (Garda) Indonesia menilai kebijakan pemangkasan komisi aplikator menjadi 8 persen belum sepenuhnya berdampak pada peningkatan pendapatan pengemudi ojek online (ojol). Pasalnya, sejumlah perusahaan aplikasi disebut justru menurunkan tarif perjalanan sehingga kenaikan pendapatan yang diterima pengemudi tidak signifikan.

Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, menjelaskan kebijakan komisi 8 persen saat ini hanya berlaku untuk layanan angkutan penumpang (ride hailing). Sementara layanan pengantaran makanan dan barang masih menggunakan skema lama, yakni potongan komisi 15 persen ditambah biaya 5 persen sebagaimana diatur sebelumnya.

"Informasi bahwa 8 persen ini memang belum mencakup untuk layanan selain penumpang. Jadi 8



Ilustrasi: Warda memandikan suara belum terdengar peneblan komisi pengemudi suara pilkada. (diant)

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pengemudi Transportasi Daring.

- **Pemotongan Komisi Drastis:**
Biaya bagi hasil yang sebelumnya mencapai rata-rata 20% kini dibatasi maksimal hanya 8% bagi aplikator.
- **Peningkatan Pendapatan Driver:**
Mitra pengemudi kini berhak membawa pulang 92% seutuhnya dari tarif yang dibayarkan konsumen.
- **Khusus Layanan Roda Dua:**
Menteri Perhubungan menegaskan bahwa skema potongan 8% ini baru diberlakukan untuk layanan transportasi penumpang roda dua (seperti GoRide atau GrabBike).
- **Jaminan Sosial:**
Regulasi ini juga memuat ketentuan perlindungan pekerja daring, termasuk kewajiban penyediaan akses BPJS Kesehatan serta Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).

persen ini hanya untuk layanan antaran penumpang atau ride hailing. Untuk layanan antaran makanan dan barang, ini belum," kata Igun dalam Diskusi Dialektika Demokrasi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/7).

Karena itu, Garda Indonesia meminta pemerintah segera

menerbitkan aturan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 agar kebijakan komisi maksimal 8 persen juga diberlakukan pada seluruh layanan transportasi online, termasuk pengantaran makanan dan barang.

Igun mengungkapkan, sebagian pengemudi memang telah merasakan

penurunan potongan komisi menjadi 8 persen. Namun di sisi lain, banyak pengemudi mengeluhkan tarif perjalanan yang justru dipangkas oleh perusahaan aplikasi.

"Kami melihat sudah dilaksanakan oleh perusahaan aplikasi. Namun keluhannya berbagai macam. Salah satunya, biaya potongan aplikasi memang diturunkan menjadi 8 persen atau pengemudi menerima 92 persen. Namun ada beberapa perusahaan aplikasi malah menurunkan tarif antaran penumpang sehingga kenaikan pendapatan tidak terlalu signifikan," ujarnya.

Ia mencontohkan, jika sebelumnya tarif perjalanan sebesar Rp10.000, maka dengan potongan komisi 8 persen pengemudi seharusnya menerima Rp9.200. Namun ketika tarif dasar diturunkan oleh aplikator, target peningkatan pendapatan tersebut tidak tercapai.

"Yang tadinya mungkin tarif Rp1.000, seharusnya pengemudi menerima Rp9.200 dan Rp800 diambil perusahaan aplikasi. Namun ternyata tarifnya diturunkan, akhirnya target pendapatan mereka tidak tercapai walaupun potongannya memang 8 persen," jelasnya.

Selain persoalan tarif, Garda juga menyoroti adanya berbagai biaya layanan tambahan yang dibebankan kepada konsumen, tetapi tidak dibagikan kepada pengemudi.

"Ada biaya-biaya layanan aplikasi yang lain memang dibebankan kepada pengguna jasa atau penumpang. Namun si pengemudi tidak mendapatkan dari situ, hanya mendapatkan dari argo saja," katanya.

Meski masih terdapat sejumlah persoalan dalam implementasinya, Garda Indonesia mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto yang menetapkan potongan komisi aplikator maksimal 8 persen. Menurut Igun, kebijakan tersebut bahkan melampaui tuntutan asosiasi yang sejak 2019 hanya meminta komisi maksimal 10 persen.

"Sejak tahun 2019 kami memperjuangkan potongan biaya aplikasi 10 persen. Namun pada 1 Mei kemarin, Presiden menetapkan biaya potongan aplikasi menjadi 8 persen. Artinya ini sudah di atas ekspektasi harapan kami dan kami sangat menyambut positif," ujarnya.

Ia menegaskan seluruh perusahaan aplikasi wajib mematuhi ketentuan tersebut selama menjalankan bisnis transportasi online di Indonesia.(tin,ant,ist/dya)

10 Perwakilan Ojol Diterima di Setneg

Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online yang hingga kini belum dipublikasikan kepada para mitra pengemudi.

"Nah, untuk terkait diterima di Setneg, kan kami tuntutannya untuk segera terbitkan Perpres. Perpres itu kan adanya di presiden dong dan di bawah presiden kan tetap di Setneg. Nah, itu untuk sementara kami sedang diterima di Setneg membahas Perpres," kata Agus.

Agus menjelaskan, 10 delegasi yang mengikuti audiensi terdiri atas lima perwakilan pengemudi roda dua dan lima perwakilan pengemudi roda empat. Mereka berharap dapat berdialog langsung dengan perwakilan Kantor Staf Presiden (KSP), bahkan bila memungkinkan bertemu langsung dengan Presiden.

"Kesepakatan dari teman-teman, target kami KSP minimal. Minimal KSP atau pun lebih, untung-untung sama presiden yang menemui. Tapi minimal kami KSP supaya ada

kekuatan untuk meminta menerbitkan Perpres itu," ujarnya.

Ia menegaskan massa aksi tidak akan membubarkan diri sebelum ada kepastian hasil pertemuan dengan pihak yang berwenang mengambil keputusan terkait Perpres tersebut.

Perwakilan pengemudi roda empat, Heri, mengatakan audiensi difokuskan pada tuntutan transparansi Perpres Nomor 27 Tahun 2026.

Menurutnya, hingga kini dokumen tersebut belum pernah dipublikasikan, sementara perusahaan aplikator sudah menerapkan kebijakan potongan komisi maksimal 8 persen.

"Terkait potongan 8 persen, ini Perpres-nya belum kelihatan tapi aplikator sudah menerapkan 8 persen. Itu dasar hukumnya dari mana? Ini yang kami akan tanyakan, terkait Perpres 27/2026 ini belum kelihatan barangnya," ujar Heri. (tin,ist/dya)



SEBANYAK 10 perwakilan pengemudi ojek online (ojol) dan taksi online yang menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, diterima untuk beraudiensi di Gedung Sekretariat Negara (Setneg), Kamis (2/7).

Perwakilan pengemudi ojol roda dua, Agus Ambon, mengatakan sejumlah perwakilan dijemput aparat kepolisian dari Polres Metro Jakarta Pusat untuk menuju Gedung Setneg.

Menurut Agus, audiensi tersebut bertujuan mendesak pemerintah segera membuka secara transparan isi Peraturan Presiden Nomor 27



PESAWAT AMA DIBAKAR DI YAHUKIMO PILOT TEWAS, 7 PENUMPANG SELAMAT DIEVAKUASI

Insiden pembakaran pesawat perintis kembali terjadi di wilayah pedalaman Papua. Pesawat milik PT Associated Mission Aviation (AMA) dengan registrasi PK-RCY dibakar sesaat setelah mendarat di Lapangan Terbang (Lapter) Balinggama, Distrik Sobaham, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Kamis (2/7/2026). Dalam peristiwa tersebut, pilot berkewarganegaraan Amerika Serikat, Nicholas F. Goselin, dilaporkan meninggal dunia, sementara tujuh penumpang yang berada di dalam pesawat berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat.

PERISTIWA PEMBAKARAN PESAWAT OLEH KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA (KKB) DI PAPUA BERIKUT INI:

Pesawat AMA (Pilatus PK-RCY)

Juli 2026
Dibakar KKB di Lapangan Terbang Balinggama, Yahukimo. Pilot asal Amerika Serikat tewas.

Pesawat Susi Air (PK-BVY)

7 Februari 2023
Dibakar KKB pimpinan Egianus Kogoya di Paro, Nduga. Pilot asal Selandia Baru disandera selama 1,5 tahun sebelum dibebaskan pada September 2024.

Pesawat MAF (Twin Otter)

6 Januari 2021
Dibakar KKB di Pagamba, Intan Jaya. Pilot asal Amerika Serikat dan seluruh penumpang berhasil diselamatkan.

TENTARA Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) mengklaim bertanggung jawab atas pembakaran pesawat perintis milik PT Associated Mission Aviation (AMA) dengan registrasi PK-RCY di Bandara Perintis Ipdeheik, Kampung Balinggama, Distrik Sobaham, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Kamis (2/7/2026).

Klaim tersebut disampaikan Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom, melalui keterangan tertulis yang diterima sejumlah media. Menurut

Keputusan mempertahankan harga Pertamina dinilai masih sesuai dengan kondisi harga keekonomian saat ini. Praktisi senior industri minyak dan gas (migas) Hadi Ismoyo memperkirakan harga keekonomian Pertamina berada di

kisaran Rp16.200 per liter, sehingga selisih dengan harga jual saat ini sangat tipis.

Menurut Hadi, perhitungan tersebut dipengaruhi oleh asumsi harga minyak mentah rata-rata sepanjang tahun sekitar US\$88 per barel dan nilai tukar

TPNPB-OPM Tuding Digunakan Dukungan Operasi Militer

Sebby, aksi tersebut dilakukan oleh pasukan TPNPB Kodap XVI Yahukimo dari Kompi Bakusip.

Dalam pernyataannya, Sebby juga mengklaim pilot pesawat berkewarganegaraan Amerika Serikat, Nicholas F. Goselin, meninggal dunia dalam insiden tersebut.

TPNPB-OPM menyatakan pembakaran pesawat dilakukan karena mereka menuduh pesawat AMA digunakan untuk mendukung operasi militer Indonesia di wilayah pedalaman Papua.

"Kami menembak dan membakar pesawat karena pesawat tersebut digunakan untuk mendukung operasi militer Indonesia di wilayah pedalaman Papua," kata Sebby Sambom.

Menurut TPNPB-OPM, aksi tersebut merupakan bagian dari kebijakan organisasi yang sebelumnya telah mengumumkan pelarangan aktivitas penerbangan di wilayah yang mereka klaim sebagai

daerah operasi.

Sebby menyebut setiap pesawat yang dinilai memberikan dukungan terhadap operasi aparat keamanan berpotensi menjadi sasaran kelompoknya. Karena itu, TPNPB-OPM kembali meminta maskapai penerbangan sipil maupun pemerintah untuk tidak mengoperasikan penerbangan di wilayah yang mereka sebut sebagai zona konflik.

Meski demikian, klaim TPNPB-OPM tersebut belum dapat diverifikasi secara independen. Aparat keamanan Indonesia hingga kini masih melakukan penyelidikan untuk memastikan kronologi, penyebab pasti insiden, serta pihak yang bertanggung jawab atas pembakaran pesawat tersebut. (ist,tin/dya)

rupiah sekitar Rp17.200 per dolar AS. Dari perhitungan itu, harga dasar Pertamina berada di kisaran Rp15.700 per liter. Setelah ditambah biaya distribusi serta pajak, nilainya meningkat menjadi sekitar Rp16.200 per liter.

"Kalau harga crude US\$88/barel, kurs Rp17.200/US\$, yield 0,6; maka harga [dasar Pertamina] sekitar Rp15.700. Ditambah cost distribusi dan pajak-pajak, sekitar Rp500, maka total harganya sekitar Rp16.200/liter. Artinya, secara komersial, harga Pertamina wajar tidak turun bulan ini," kata Hadi Ismoyo.

Selain itu, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menghitung harga keekonomian Pertamina bahkan berada di sekitar Rp16.444 per liter. Perhitungan itu menggunakan asumsi rata-rata harga minyak Brent tahun berjalan sebesar US\$87,9 per barel serta rata-rata kurs rupiah Rp17.195 per dolar AS.

Josua menilai ruang penurunan harga Pertamina masih terbatas karena harga jual Rp16.250 per liter saat ini sudah mendekati harga keekonomiannya.

"Dengan asumsi rata-rata Brent sepanjang tahun berjalan US\$87,9/barel dan rata-rata USD/IDR Rp17.195, perhitungan interpolasi dalam dokumen menunjukkan harga ke-ekonomian Pertamina atau bensin RON 92 sekitar Rp16.444/liter," ujar Josua.

Sebelumnya, harga Pertamina sempat bertahan di angka Rp12.300 per liter selama sekitar tiga bulan sebelum naik menjadi Rp16.250 per liter pada 10 Juni 2026. Pertamina Patra Niaga menyebut kenaikan tersebut belum sepenuhnya mengikuti harga pasar karena penyesuaian baru sekitar 50 persen dari selisih harga keekonomian.

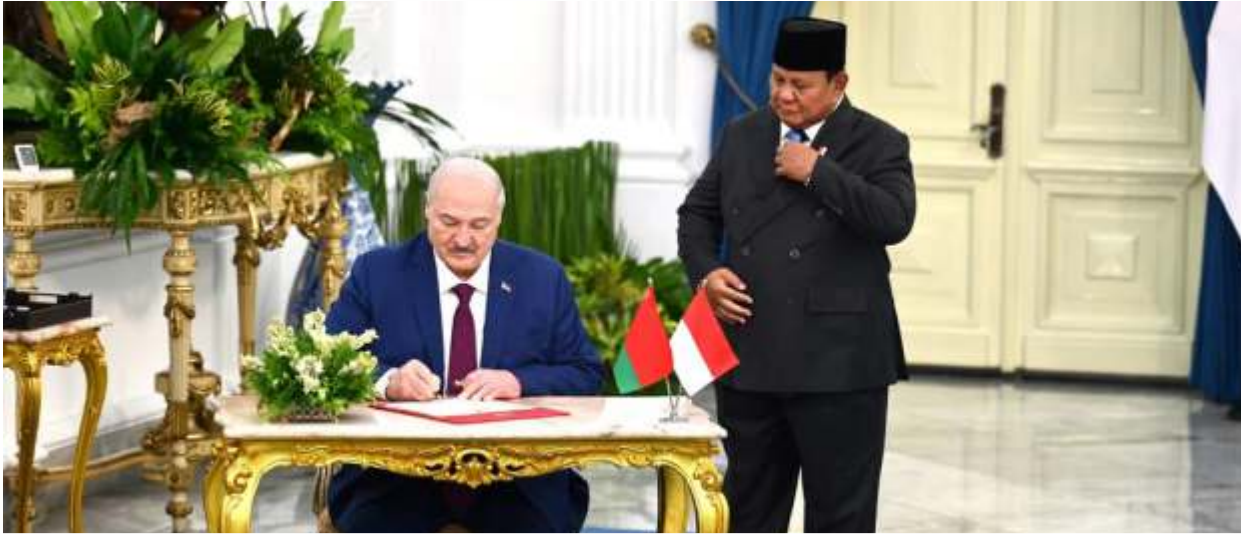
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun mengatakan penyesuaian harga tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat.

"Penyesuaian harga Pertamina yang dilakukan saat ini adalah 50% dari selisih harga pasar, dan jika dibandingkan dengan harga BBM sejenis di negara-negara tetangga ASEAN tetap lebih kompetitif agar menjaga daya beli dan perekonomian," kata Roberth. (gus,ist/dya)



RI DAN BELARUS PERKUAT HUBUNGAN BILATERAL, SEPAKATI TUJUH MOU DI BERBAGAI SEKTOR STRATEGIS

Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Belarus Alexander Lukashenko menyepakati tujuh nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dan perjanjian kerja sama dalam pertemuan bilateral di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (2/7). Kesepakatan tersebut menjadi langkah konkret kedua negara dalam memperkuat hubungan bilateral di berbagai sektor strategis.



Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Presiden Belarus Alexander Lukashenko di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (2/7/2026). Kedua pemimpin negara tampak berjalan bersama sebelum menggelar pertemuan resmi. Afp

Prabowo mengatakan komitmen Indonesia dan Belarus tidak hanya diwujudkan melalui pertemuan tingkat kepala negara, tetapi juga melalui penandatanganan sejumlah dokumen kerja sama yang mencakup sektor kesehatan, kebudayaan, industri, sains dan teknologi, jasa keuangan, hingga pelaporan transaksi keuangan.

"Komitmen Indonesia dan Belarus untuk memperkuat hubungan bilateral juga dibuktikan hari ini dengan disepakati sejumlah dokumen kerja sama oleh delegasi kedua negara di bidang kesehatan, budaya, akreditasi nasional, pelaporan transaksi keuangan, industri, sains dan teknologi serta jasa keuangan," kata Prabowo.

Tujuh dokumen yang ditandatangani meliputi kerja sama industri antara Kementerian Perindustrian RI dan Kementerian Perindustrian Belarus, kerja sama bidang kebudayaan, kerja sama jasa keuangan antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Nasional Belarus, serta kerja sama bidang kesehatan antara Kementerian Kesehatan kedua negara.

Selain itu, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Akademi Ilmu Pengetahuan Nasional Belarus menyepakati kerja sama ilmiah dan teknis di bidang sains dan teknologi. Indonesia dan Belarus juga memperkuat kolaborasi dalam pencegahan kejahatan keuangan melalui MoU antara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dengan Departemen Pengawasan Keuangan Komite Pengawasan Negara Belarus terkait pertukaran laporan intelijen

mengenai tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, dan proliferasi senjata pemusnah massal.

Kerja sama lainnya mencakup bidang akreditasi nasional yang disepakati antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) RI dengan lembaga akreditasi nasional Belarus.

Melalui penandatanganan tujuh MoU tersebut, kedua negara berkomitmen memperluas kemitraan di bidang industri, kesehatan, riset,

keuangan, hingga tata kelola standar nasional sebagai bagian dari penguatan hubungan bilateral Indonesia dan Belarus.

Presiden Belarus Aleksandr Lukashenko mengenang kunjungan pertamanya ke Indonesia pada 2013 saat menghadiri pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (2/7). Ia mengaku terkesan dengan pesatnya pembangunan Indonesia dan

meyakini pertumbuhan ekonomi Tanah Air akan terus berlanjut.

Mengawali pernyataannya, Lukashenko menyampaikan apresiasi atas sambutan yang diberikan pemerintah Indonesia kepada dirinya beserta delegasi Belarus.

"Pertama-tama, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Presiden Indonesia atas undangan mengunjungi negara yang indah ini yang juga dinikmati oleh delegasi Belarus yang lainnya," ujar Lukashenko.

Ia kemudian mengenang kunjungan perdananya lebih dari satu dekade lalu. Menurutnya, perkembangan Indonesia berlangsung sangat cepat dibanding saat ia pertama kali datang.

"Saya mengenang selalu kunjungan pertama saya yang tahun 2013 lalu dan saya melihat sendiri betapa cepatnya negara yang indah ini dan saya yakin bahwa ekonominya akan terus tumbuh," katanya.

Lukashenko menjelaskan kunjungan kenegaraannya ke Indonesia telah dipersiapkan sejak satu tahun lalu dan membuahkan sejumlah hasil konkret. Selain peluncuran peta jalan kerja sama bilateral Indonesia-Belarus 2026-2030, kedua negara juga menandatangani berbagai perjanjian kerja sama bernilai strategis. (wid,ist/dya)

Kepala Negara Sahabat Pertama yang Menginap di Istana Negara

PRESIDEN Republik Belarus Aleksandr Lukashenko menjadi kepala negara sahabat pertama yang menginap di Istana Negara selama kunjungan kenegaraannya ke Indonesia pada 1-2 Juli 2026. Hal tersebut diungkapkan Menteri Luar Negeri Sugiono di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (2/7).

Sugiono mengatakan, keputusan tersebut merupakan bentuk penghormatan yang diberikan Presiden Prabowo Subianto kepada Lukashenko. Awalnya, Presiden Belarus dijadwalkan menginap di Wisma Negara, namun kemudian diputuskan untuk bermalam di Istana Negara.

"Presiden yang pertama di Istana Negara," kata Sugiono.

Menurut Sugiono, keinginan untuk menginap di kompleks Istana

berasal dari Lukashenko sendiri. Menanggapi hal itu, Presiden Prabowo mempersilakan tamunya bermalam di Istana Negara sebagai bentuk penghormatan dalam kunjungan kenegaraannya..

"Ya saya kira kita memberikan penghormatan karena biasanya juga kalau kunjungan kenegaraan presiden yang lain berkehendak di hotel, tapi beliau kali ini ingin berkehendak untuk bisa di Istana. Tadinya di Wisma Negara, tapi Pak Presiden menilai yang lebih representatif ya di Istana," ujar Sugiono.

Ia menjelaskan, sebelumnya memang pernah ada pemimpin negara yang bermalam di kawasan Kompleks Istana Kepresidenan, namun bukan di Istana Negara. Sugiono menyebut Perdana Menteri Kamboja Hun Sen pernah menginap

di Wisma Negara.

"Kalau di Wisma Negara terakhir itu Perdana Menteri Kamboja Hun Sen," katanya.

Lukashenko tiba di Indonesia pada Rabu (1/7/2026) dan disambut Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta. Kunjungan tersebut merupakan kunjungan balasan setelah Presiden Prabowo Subianto lebih dahulu mengunjungi Belarus.

Selama berada di Jakarta, Lukashenko menjalani pertemuan bilateral dengan Prabowo di Istana Merdeka. Pertemuan itu menghasilkan peluncuran peta jalan kerja sama Indonesia-Belarus 2026-2030 serta penandatanganan sejumlah nota kesepahaman di berbagai sektor strategis. (ist/dya)

Potensi Tumpang Tindih dengan Angkutan Gratis, Nasib Bus Halokes Dikaji

MALANG-Pemerintah Kota Malang menghadapi potensi tumpang tindih layanan transportasi pelajar. Di saat Dinas Perhubungan bersiap meluncurkan Program Angkutan Gratis bagi Pelajar pada Juli ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan masih mengoperasikan Bus Halokes yang selama ini memiliki fungsi serupa, yakni mengantar dan menjemput siswa.

Kepala Disdikbud Kota Malang, Suwarjana, mengatakan seluruh armada Bus Halokes hingga kini masih tetap beroperasi melayani siswa. Sebab, program Angkutan Gratis bagi Pelajar belum resmi dijalankan.

"Masih jalan. Masih beroperasi sampai detik ini. Karena kita tahu program Angkutan Gratis bagi Pelajar juga belum beroperasi," ujar Suwarjana, Kamis (2/7/2026).

Dijelaskannya, pemanfaatan armada Bus Halokes setelah program angkutan gratis mulai berjalan masih akan dibahas bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Mengingat seluruh armada tersebut merupakan aset milik Pemerintah Kota Malang.

"Pasti nanti ada penanganan nanti

seperti apa. Kami koordinasi, bagaimanapun Bus Halokes itu kan asetnya Pemerintah Kota Malang juga. Nanti kami koordinasi dengan bidang aset yang ada di BKAD. Mau dikemana nanti kami koordinasikan,"katanya.

Saat ini, Bus Halokes masih menjadi layanan transportasi sekolah yang dikelola Pemerintah Kota Malang. Berdasarkan data Disdikbud, terdapat 13 armada yang terdiri atas 6 unit bus dan 7 unit mobil elf. Seluruh armada tersebut selama ini digunakan untuk melayani antar-jemput siswa di sejumlah sekolah yang membutuhkan layanan transportasi khusus.

Belakangan, juga muncul anggapan bahwa sejumlah armada Bus Halokes mulai dipersiapkan untuk tidak lagi beroperasi setelah tulisan "Bus Halokes" pada beberapa kendaraan dihapus. Namun, Suwarjana menegaskan hal tersebut tidak berkaitan dengan rencana penghentian operasional.

"Itu hanya kami renov beberapa waktu lalu. Tulisannya sudah tidak sesuai dengan kenyamanan teman-teman, kaitannya dengan cat. Kemarin pengecatan saja. Bukan kaitannya

dengan sudah tidak akan beroperasi," tegasnya.

Terkait respons masyarakat terhadap rencana penerapan Program Angkutan Gratis bagi Pelajar, Suwarjana memilih tidak memberikan penilaian. "Waduh saya tidak tahu. Biar nanti yang berbicara adalah masyarakat," katanya.

Sementara itu, untuk mendukung operasional Angkutan Gratis bagi Pelajar, Dishub Kota Malang akan memasang sistem pemantauan digital di setiap armada angkutan kota (angkot) yang beroperasi.

"Ini adalah upaya kami untuk memastikan layanan angkutan pelajar berjalan optimal dan tepat sasaran. Setiap armada yang bekerja sama wajib dilengkapi dengan alat pemantau agar setiap pergerakan dapat terlacak dengan akurat," ujar Kepala Dishub Kota Malang, Widjaja Saleh Putra.

Menurut pria yang akrab disapa



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, Suwarjana. (Santi/Lentera)

Jaya ini, sistem monitoring tersebut akan terhubung dengan aplikasi yang dikembangkan koperasi angkot. Sehingga dapat memantau berbagai data operasional secara transparan, mulai dari posisi kendaraan, jarak tempuh, hingga aktivitas layanan selama beroperasi. Data tersebut menjadi acuan dalam penyaluran subsidi karena skema pembayaran dilakukan berdasarkan jumlah kilometer yang ditempuh setiap armada. (Santi/Dya)

Program 3 Juta Rumah di Malang

Capai 1.600 Unit, Pemkab Usulkan Tambahan Penerima



Warga Kalisongo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Jamia, menunjukkan foto sebelum dan sesudah rumahnya direnovasi dalam Program 3 Juta Rumah. (Santi/Lentera)

wilayah lainnya," ujar Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya (DPKPCK) Kabupaten Malang, Farid Habibah, dikutip pada Kamis (2/6/2026).

Dijelaskannya, pelaksanaan Program 3 Juta Rumah tidak hanya bergantung pada satu sumber pendanaan. Berbagai pihak turut berkontribusi untuk mendukung percepatan

program nasional tersebut. Mulai dari corporate social responsibility (CSR), APBD, APBN, hingga asosiasi pengembang perumahan.

"Pendanaannya bukan hanya dari CSR. Kami juga mendapat dukungan dari Baznas, asosiasi pengembang, APBD, hingga APBN. Secara keseluruhan, untuk mendukung Program 3 Juta Rumah, capaian Kabupaten Malang sudah mencapai lebih dari 1.600 unit pada tahun 2026 ini," jelas Habibah.

Saat ini, Habibah menyebut Pemkab Malang berencana mengusulkan tambahan penerima manfaat, khususnya di wilayah Kecamatan Kepanjen.

Menurutnya, pengembangan kawasan yang menjad ibu kota Kabupaten Malang tersebut perlu diimbangi dengan peningkatan akses masyarakat terhadap hunian yang layak.

"Kami juga ingin mengusulkan tambahan penerima manfaat di wilayah Kepanjen. Bagaimanapun pengembangan Kepanjen sebagai kawasan perkotaan juga perlu mendapatkan perhatian," ungkapnya.

Lebih lanjut, Habibah menjelaskan, masyarakat yang dapat memperoleh bantuan dalam program 3 Juta Rumah merupakan kelompok yang masuk kategori desil 1 (miskin ekstrem) hingga desil 4 (rentan miskin) berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Habibah juga menjelaskan, program 3 Juta Rumah tidak selalu diwujudkan melalui pembangunan

rumah baru. Menurutnya, pemerintah terlebih dahulu melakukan identifikasi terhadap kebutuhan masyarakat, apakah termasuk backlog kepemilikan rumah atau backlog kelayakan fasilitas hunian.

Karena itu, implementasi program dilakukan melalui berbagai pendekatan, seperti rumah bersubsidi maupun rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH). "Jadi upaya mencapai target Program 3 Juta Rumah dilakukan melalui beberapa skema, baik rumah bersubsidi maupun program bedah rumah tidak layak huni," tambahnya.

Untuk program rehabilitasi rumah, Habibah mengatakan, saat ini masih menggunakan plafon bantuan sebesar Rp25 juta per unit. Meski demikian, pihaknya mengakui kenaikan harga material bangunan menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan program tersebut.

Karena itu, DPKPCK melakukan penyesuaian perencanaan agar anggaran yang tersedia tetap mampu menghasilkan bangunan yang layak tanpa mengurangi kualitas. (Santi/Dya)

Serangan terbaru Rusia tewaskan puluhan orang di Ukraina. (ist)



RUSIA TUDING UKRAINA GUNAKAN RUDAL BALISTIK, 17 TEWAS

Konflik Rusia-Ukraina kembali memasuki babak yang lebih intens. Rusia mengklaim Ukraina untuk pertama kalinya menggunakan rudal balistik dalam operasi militernya. Klaim tersebut muncul di tengah serangan besar-besaran Moskow ke ibu kota Ukraina, Kyiv, yang menewaskan sedikitnya 17 orang dan menghancurkan sejumlah kawasan permukiman.

Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan sistem pertahanan udaranya berhasil mencegah apa yang mereka sebut sebagai "rudal taktis-operasional jarak

jauh" dalam 24 jam terakhir. Selain rudal tersebut, Rusia juga mengklaim berhasil menghancurkan tujuh bom berpemandu serta 602 drone bersayap tetap (fixed-wing drones)

milik Ukraina.

Meski demikian, Moskow tidak mengungkap jenis rudal yang digunakan maupun lokasi peluncurannya. Hingga kini,

pemerintah Ukraina juga belum memberikan konfirmasi resmi terkait dugaan penggunaan rudal balistik tersebut.

Klaim Rusia muncul setelah perusahaan pertahanan Ukraina Fire Point mengumumkan rudal balistik buatannya, FP-9, telah mendekati tahap uji terbang. Kepala Desainer Fire Point, Denys Shtilerman, sebelumnya mengatakan rudal tersebut ditargetkan menjalani uji coba pada musim panas atau paling lambat awal musim gugur setelah pengembangan mesinnya rampung.

Menurut spesifikasi perusahaan, FP-9 memiliki jangkauan hingga 850 kilometer dan dirancang untuk menghantam sasaran jauh di wilayah Rusia. Jika benar telah digunakan di medan tempur, rudal itu akan menjadi tonggak baru dalam upaya Ukraina memperkuat kemampuan serangan jarak jauh berbasis produksi dalam negeri yang selama ini lebih banyak mengandalkan drone dan rudal jelajah. Dengan lintasan berkecepatan tinggi, rudal balistik dinilai lebih sulit dideteksi dan dicegat sistem pertahanan udara.

Tak lama setelah klaim tersebut mencuat, Rusia melancarkan salah satu serangan terbesar sejak perang dimulai. Ratusan drone dan puluhan rudal menghantam Kyiv selama berjam-jam, menghancurkan gedung apartemen, memicu kebakaran, serta merusak sejumlah fasilitas sipil.

Wartawan di lapangan melaporkan ledakan terdengar sejak Rabu malam hingga Kamis dini hari. Warga, termasuk anak-anak dan mereka yang membawa hewan peliharaan, berlarian menuju stasiun metro untuk mencari perlindungan. Di sejumlah lokasi, kepulan asap membumbung tinggi dari bangunan yang hancur, sementara tim penyelamat berupaya mencari korban di bawah reruntuhan. Seorang ibu bahkan terlihat menangis sambil memeluk putranya di depan puing-puing apartemen yang masih berasap.

Wali Kota Kyiv Vitali Klitschko mengatakan, "Hingga saat ini, 13 kematian telah tercatat," dengan 86 orang lainnya mengalami luka-luka. Namun, laporan terbaru dari layanan darurat Ukraina menyebut jumlah korban tewas meningkat menjadi sedikitnya 17 orang.

Serangan tersebut terjadi hanya beberapa jam setelah Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memperingatkan bahwa Moskow tengah mempersiapkan "serangan besar-besaran". Rusia disebut meningkatkan tekanan setelah Ukraina melancarkan serangan lebih jauh ke wilayah Rusia yang diklaim menghancurkan sejumlah infrastruktur strategis, termasuk satelit terbesar milik Rusia.

Kremlin sebelumnya juga telah bersumpah akan meningkatkan tekanan militer terhadap Kyiv sebagai respons atas serangan-serangan



(Dokumen) Bagian-bagian pipa Nord Stream 2 dipasang di Laut Baltik, di lepas pantai timur laut Jerman, pada November 2018. (AFP)

Jerman Tuduh Kyiv Dalangi Peledakan Pipa Gas Nord Stream

"ia dan anggota militer lainnya... mengembangkan rencana untuk menghancurkan" jaringan pipa Nord Stream dengan tujuan memutus salah satu

sumber utama pendapatan Rusia dari ekspor gas alam ke Eropa.

Tersangka yang diidentifikasi sebagai Serhii Kuznietsov merupakan seorang perwira Angkatan Bersenjata Ukraina. Ia ditangkap di Italia pada musim panas 2025 sebelum diekstradisi ke Jerman pada November tahun yang sama.

Jaksa mengungkap Kuznietsov memimpin sebuah tim yang terdiri atas beberapa penyelam profesional, seorang kapten kapal, dan seorang ahli bahan peledak. Tim tersebut diduga menyewa sebuah kapal pesiar dari Pelabuhan Rostock di pesisir Laut Baltik, Jerman, menggunakan identitas palsu untuk menjalankan operasi sabotase.

Dalam pelaksanaannya, tim

penyelam diduga memasang bahan peledak di dasar Laut Baltik pada jaringan pipa Nord Stream. Ledakan yang terjadi pada September 2022 menghancurkan tiga dari empat pipa bawah laut Nord Stream, sehingga menghentikan aliran gas Rusia menuju Jerman melalui jalur tersebut.

Insiden itu juga menyebabkan kebocoran metana dalam jumlah sangat besar ke atmosfer, yang disebut sebagai salah satu pelepasan gas metana terbesar akibat kerusakan infrastruktur energi bawah laut.

Sejak awal, ledakan Nord Stream menjadi salah satu misteri terbesar dalam konflik Rusia-Ukraina. Rusia, Ukraina, dan negara-negara Barat saling melontarkan tuduhan mengenai pihak yang bertanggung jawab. Namun, dakwaan terbaru ini menjadi pertama kalinya otoritas penegak hukum Jerman secara terbuka menyebut adanya dugaan keterlibatan otoritas negara Ukraina dalam perencanaan operasi tersebut. (tin,ist/dya)

JAKSA federal Jerman secara resmi menuduh otoritas Ukraina berada di balik sabotase pipa gas Nord Stream pada 2022. Tuduhan tersebut seorang perwira militer Ukraina dan dinilai berpotensi memperumit hubungan Berlin dengan Kyiv, mengingat Jerman selama ini merupakan salah satu pendukung utama Ukraina dalam menghadapi invasi Rusia.

Dalam dokumen dakwaan yang dirilis Kamis (2/7), jaksa menyatakan tersangka bersama sejumlah personel militer Ukraina lainnya bertindak "atas perintah otoritas negara di Ukraina."

Menurut jaksa, setelah invasi penuh Rusia ke Ukraina pada Februari 2022,

Niat Gizi Ekstra Berujung Petaka Bahaya Susu Formula Dicampur Jus

Niat hati ingin memberikan nutrisi terbaik dan ekstra bagi sang buah hati, tindakan sepasang orang tua di Provinsi Guangdong, China Selatan, justru berujung pada kepanikan luar biasa yang nyaris merenggut nyawa. Seorang bayi laki-laki yang baru menginjak usia tiga bulan terpaksa dilarikan ke Rumah Sakit Zhongshan Women and Children's Hospital setelah tubuhnya mendadak berubah menjadi keunguan, bibirnya membiru, dan mengalami sesak napas akut.

Gejala mengerikan ini muncul tidak lama setelah bayi mengonsumsi susu formula. Berdasarkan pengakuan jujur orang tuanya, mereka memang sengaja menyeduh susu formula menggunakan jus sayuran, bukan air putih matang seperti petunjuk standar.

Mereka berasumsi bahwa cairan pekat dari perasan sayur akan memberikan vitamin yang jauh lebih melimpah dibandingkan air biasa, tanpa menyadari bahwa keputusan tersebut justru membawa petaka bagi sang anak.

Setelah melalui pemeriksaan intensif di ruang Intensive Care Unit (ICU), tim medis mendiagnosis bayi malang tersebut mengalami keracunan nitrit tingkat tinggi.

Dokter yang menangani kasus ini menjelaskan bahwa sayuran yang direbus terlalu lama dapat menghasilkan cairan dengan kadar nitrit yang tinggi. Jika air rebusan atau jus sayuran tersebut digunakan untuk melarutkan susu formula, bayi berisiko besar mengalami keracunan.

Sementara itu, bayi berusia tiga bulan masih memiliki sistem pencernaan dan fungsi ginjal yang belum berkembang sempurna sehingga belum mampu mengolah kadar nitrat maupun nitrit dalam jumlah tinggi. Ketika zat kimia alami ini masuk ke dalam

aliran darah bayi, nitrit langsung mengganggu kemampuan darah dalam mengangkut oksigen ke seluruh tubuh.

Akibatnya, bibir, kulit, dan kuku bayi dapat berubah menjadi kebiruan atau keunguan karena kekurangan oksigen. Beruntung, setelah mendapatkan perawatan ketat selama dua hari di ruang ICU, kondisi bayi tersebut membaik dan diperbolehkan pulang dari rumah sakit pada pertengahan Juni.

Kasus tragis ini langsung memicu reaksi keras dan peringatan dari para ahli medis. Dokter anak Cao Qi dari Nanning No 1 People's Hospital di Guangxi mengimbau dengan sangat agar para orang tua segera mengenali tanda-tanda keracunan nitrit dan langsung membawa bayi ke rumah sakit apabila gejalanya muncul.

"Menunda penanganan hanya beberapa menit saja dapat membahayakan nyawa bayi," ujar Cao dengan tegas melalui media sosialnya.

Ia juga mengingatkan agar orang tua tidak ceroboh mengikuti tren atau mengambil keputusan sepihak yang hanya berlandaskan asumsi pribadi saat merawat bayi. "Makanan alami belum tentu aman untuk bayi yang masih sangat kecil," katanya mengingatkan.

Secara medis, tindakan mencampur atau melarutkan susu formula dengan zat lain di luar air putih matang adalah kesalahan yang mengancam fungsi organ vital anak.

Susu formula bubuk telah dirancang dengan komposisi nutrisi, osmolaritas, dan konsentrasi yang sangat presisi agar menyerupai Air Susu Ibu. Ketika air pelarut diganti dengan jus buah atau jus

sayuran, keseimbangan formula tersebut rusak sepenuhnya.

Tingkat keasaman atau pH dari jus dapat merubah struktur protein dalam susu formula hingga menggumpal, membuatnya sangat sulit dipecah oleh lambung bayi. Selain itu, memaksa ginjal bayi yang belum matang untuk menyaring mineral padat dan zat kimia dari jus sayuran sama saja dengan memicu kegagalan fungsi ginjal akut karena beban kerja yang melampaui batas normal tubuhnya.

Peristiwa ini sekaligus menjadi alarm keras bagi para orang tua untuk kembali memahami aturan emas pemberian makanan dan minuman yang disesuaikan secara ketat berdasarkan tahapan usia anak.

Pada fase awal kehidupan, yaitu usia nol hingga enam bulan, aturan yang berlaku adalah mutlak. Bayi hanya boleh mengonsumsi ASI eksklusif atau susu formula yang dilarutkan dengan air putih matang yang steril.

Pada rentang usia ini, pemberian air putih dalam jumlah berlebih saja bisa memicu pengenceran darah yang berbahaya, apalagi pemberian cairan kompleks seperti jus buah, jus sayuran, madu, atau bahkan kopi.

Tubuh bayi di bawah enam bulan belum memiliki enzim pencernaan yang memadai untuk mengolah zat-zat tersebut, sehingga bahan alami yang dianggap sehat untuk orang dewasa justru berpotensi menjadi racun mematikan di dalam tubuh mungil mereka. Memasuki fase usia enam

hingga dua belas bulan, anak mulai diperkenalkan dengan Makanan Pendamping ASI atau MPASI yang diberikan secara bertahap, mulai dari tekstur bubur saring halus hingga meningkatkan ke tekstur

yang lebih padat. Di fase ini, ASI atau susu formula tetap memegang peranan sebagai sumber energi utama, sementara air putih matang mulai boleh diberikan dalam jumlah sangat kecil, biasanya hanya beberapa sendok setelah anak selesai makan demi membersihkan rongga mulut. (ist/dya)

Panduan Nutrisi Aman Sesuai Usia

Usia 0 – 6 Bulan (Hanya ASI / Susu Formula)

- * ASI Eksklusif.
- * Susu formula yang dilarutkan hanya dengan air putih matang sesuai takaran.

- Pantangan Mutlak):
- * Dilarang mencampur susu formula dengan jus, madu, teh, atau cairan lain.

Usia 6 – 12 Bulan (Mulai Belajar MPASI)

- * Makanan Pendamping ASI (MPASI) rumahan dengan tekstur bertahap (saring/bubur halus ke cincang).

- * TIDAK BOLEH:
- * Madu (Bahaya! Risiko spora bakteri penyebab kelumpuhan/botulisme).

Usia 1 – 3 Tahun (Fase Eksplorasi Makanan Keluarga)

- * Makanan padat menu keluarga dengan gizi seimbang (karbohidrat, protein, lemak, serat).
- * Susu sapi segar (UHT atau Full Cream) sebagai tambahan nutrisi.

- * TIDAK BOLEH:
- * Minuman kemasan tinggi gula, soda, dan minuman berkafein (the pekat /kopi).



Kepolisian Osaka Luncurkan 'Aiko', Polisi Virtual Lawan Sindikat Siber

Menghadapi lonjakan kasus penipuan siber yang semakin canggih, Kepolisian Prefektur Osaka di Jepang mengambil langkah progresif dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI). Aparat penegak hukum setempat resmi memperkenalkan sesosok "kepala polisi virtual" bernama Aiko yang bertugas memberikan edukasi interaktif guna mencegah masyarakat menjadi korban penipuan online (special fraud).

Karakter Aiko pertama kali diperkenalkan kepada publik melalui kanal YouTube resmi Kepolisian Prefektur Osaka. Berdasarkan laporan dari kantor berita Kyodo News, inisiatif inovatif ini diambil menyusul peningkatan signifikan kasus

penipuan dengan modus penyamaran identitas (impersonation scams) di wilayah tersebut. Polisi berharap kehadiran figur virtual ini dapat memperluas jangkauan kampanye pencegahan kejahatan mereka, khususnya menasar generasi muda yang dikenal sangat aktif di dunia digital.

Filosofi Nama dan Karakterisasi Aiko

Secara etimologi, nama "Aiko" merupakan perpaduan kreatif antara akronim teknologi AI (Artificial Intelligence) dan "ko", yang dalam budaya Jepang merupakan akhiran populer untuk nama perempuan. Karakter ini dirancang secara visual dan auditori agar menyerupai sosok

perempuan muda, menciptakan kesan yang ramah, modern, dan mudah didekati oleh netizen. Melalui video edukasi bertajuk "Kelas Pencegahan Kejahatan Kepala Aiko" yang dirilis pada akhir Mei, polisi siber virtual ini membedah berbagai taktik manipulasi psikologis (psywar) serta menyimulasikan percakapan daring tiruan antara pelaku kejahatan dan korban.

Dalam salah satu segmen videonya, Aiko memberikan peringatan keras kepada masyarakat: "Tidak ada polisi yang menunjukkan kartu identitas dan surat perintah penangkapan secara daring," tegas Aiko.

Selama ini ada stereotipe bahwa penipuan online atau phishing hanya menasar kelompok lanjut usia (lansia). Namun, data kepolisian Osaka mengungkap fakta yang mengkhawatirkan. Sindikat penipuan modern kini gencar mengincar produktifitas usia muda hingga paruh baya.

Menurut data sementara yang dirilis kepolisian, para pelaku kejahatan siber kerap menyamar sebagai aparat penegak hukum, figur publik atau selebritas yang menawarkan investasi bodong, hingga modus penipuan romansa (romance scams).

Berdasarkan statistik terbaru Prefektur Osaka tahun lalu, warga yang berusia 64 tahun ke bawah justru menyumbang hampir separuh dari total keseluruhan korban penipuan serupa. Fenomena ini menunjukkan bahwa kelompok usia 20-an hingga 60-an tahun memiliki kerentanan yang sama tingginya di ruang digital.

Toshinori Hirano, seorang profesor tamu di Pusat Keamanan Siber Universitas Kagawa sekaligus pakar yang membantu kepolisian dalam merancang proyek ini, menekankan pentingnya kolaborasi antara teknologi dan edukasi publik.

Penggunaan Aiko oleh Kepolisian Osaka menandai era baru dalam taktik kepolisian modern (smart policing).

Dengan memadukan ketegasan hukum dan pendekatan teknologi yang interaktif, Jepang berusaha membalikkan keadaan melawan sindikat kriminal siber yang terus berevolusi. (ist/dya)



Polkadot Is Back! Padu Padan Hijab dengan Kemeja Motif Bintik yang Stylish

Motif polkadot kembali mencuri perhatian di dunia fesyen. Pola bintik-bintik yang identik dengan nuansa retro ini tetap mampu memberikan kesan feminin, ceria, sekaligus klasik tanpa kehilangan sentuhan modern.



Bagi para hijabers, kemeja atau blus polkadot memang memiliki tantangan tersendiri. Motif yang cukup ramai perlu dipadukan dengan item lain secara tepat agar tampilan tidak terlihat berlebihan.

Kuncinya ada pada keseimbangan. Pemilihan warna hijab, jenis bawahan, hingga permainan tekstur perlu diperhatikan agar siluet tubuh tetap terlihat proporsional dan gaya tetap terasa elegan.

Motif polkadot juga cukup fleksibel. Dengan padu padan yang tepat, satu kemeja bermotif bintik bisa digunakan untuk berbagai suasana, mulai dari tampilan santai sehari-hari hingga gaya semi formal.

Blus Polkadot dengan Jeans atau Rok Panjang

Cara paling aman memakai motif polkadot adalah mengimbangnya dengan bawahan polos. Blus atau kemeja dengan motif polkadot kecil bisa dipadukan dengan celana denim, celana kulot, maupun rok panjang berwarna netral. Kombinasi ini membuat tampilan tetap terlihat santai tetapi tidak kehilangan unsur feminin.

Untuk hijab, warna-warna netral seperti beige, coklat tua, krem, atau putih tulang bisa menjadi pilihan agar keseluruhan outfit terlihat lebih rapi. Gaya ini cocok digunakan untuk aktivitas harian karena memberikan kesan effortless.

Anggun dengan Setelan Polkadot

Bagi yang ingin tampil lebih berani, setelan atasan dan bawahan dengan motif polkadot senada bisa menjadi pilihan. Perpaduan satu motif dari atas hingga bawah menciptakan kesan lebih elegan, terutama jika diseimbangkan dengan hijab warna lembut seperti nude atau krem.

Agar tidak terlihat terlalu ramai, pilih aksesoris sederhana dan biarkan motif polkadot menjadi pusat perhatian.

Polkadot Hitam dengan Hijab Nude

Kombinasi warna hitam dan nude menjadi salah satu pilihan yang memberikan kesan elegan.

Blus polkadot hitam, terutama yang memiliki detail feminin seperti pita atau aksesoris lengan, dapat dipadukan dengan hijab nude yang dililit rapi.

Kontras antara warna gelap pada pakaian dan warna lembut pada hijab

membuat tampilan terlihat lebih seimbang. Tambahkan jeans atau celana warna terang untuk menciptakan kesan kasual modern.

Kemeja Polkadot Silk dengan Layering Apron

Untuk gaya yang lebih unik, kemeja polkadot berbahan silk bisa menjadi pilihan.

Kemeja putih dengan motif polkadot hitam dan detail pita di bagian depan dapat dipadukan dengan hijab segi empat warna krem. Tambahkan layering seperti apron berbahan lace dapat memberikan sentuhan vintage sekaligus feminin.

Gaya ini cocok untuk acara yang membutuhkan tampilan rapi tetapi tetap memiliki karakter.

Polkadot Putih dengan Aksen Pink Lembut

Kemeja polkadot putih dengan sentuhan warna pink memberikan kesan manis dan segar.

Padukan dengan rok lipit putih untuk menciptakan tampilan yang lebih anggun. Hijab warna off-white, cream, atau warna netral lainnya dapat melengkapi gaya kasual-formal tersebut.

Kombinasi ini cocok digunakan untuk acara santai, pertemuan keluarga, maupun kegiatan semi formal.

Kemeja Polkadot dengan Celana Kulot

Bagi yang menyukai gaya lebih nyaman, kombinasi kemeja polkadot dengan celana kulot bisa menjadi pilihan.

Kemeja polkadot

hitam dipadukan dengan kulot warna coklat tua berbahan mengilap memberikan nuansa earthy tone yang tetap terlihat feminin.

Tambahkan hijab instan atau hijab segi empat dengan styling sederhana agar tampilan tetap praktis tetapi modis.

Polkadot membuktikan bahwa motif klasik tidak selalu identik dengan gaya lama. Dengan permainan warna dan potongan yang tepat, motif ini bisa kembali menjadi pilihan fashion hijab modern yang terlihat segar dan relevan untuk berbagai generasi. (ist/dya)



Jejak Jenderal Mengakali ...dari hal 1

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadag-gadag menjadi solusi pemerintah menekan angka stunting justru tercoreng oleh dugaan korupsi. Setelah menyeret sejumlah pejabat tinggi Badan Gizi Nasional (BGN), penyidikan Kejaksaan Agung kini merambah keterlibatan aparat penegak hukum. Perkembangan terbaru diumumkan Kejaksaan Agung pada Kamis (2/7/2026). Penyidik menetapkan Brigadir Jenderal Polisi Lalu Muhammad Iwan Mahardan sebagai tersangka ketujuh dalam perkara dugaan korupsi tata kelola MBG.

Mantan Kepala Biro Hukum dan Humas BGN yang sejak Maret 2025 menjabat Sekretaris Deputy Bidang Promosi dan Kerja Sama itu langsung ditahan di Rumah Tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selama 20 hari pertama untuk kepentingan penyidikan.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung, Syarif Sulaeman Nahdi, mengungkapkan penyidikan juga menemukan dugaan keterlibatan seorang prajurit TNI aktif, yakni Kolonel Cpl BU.

"Berdasarkan pengembangan penyidikan dari tindak pidana korupsi tata kelola MBG ini, kami menemukan adanya keterlibatan oknum TNI aktif yang menjabat sebagai Sekretaris Deputy Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN. Yang bersangkutan juga bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK dalam pengadaan barang dan jasa, terutama pengadaan sepeda motor," ujar Syarif.

Meski demikian, Kejaksaan belum menetapkan Kolonel Cpl BU sebagai tersangka. Penyidik masih berkoordinasi dengan TNI mengingat statusnya sebagai prajurit aktif.

Dalam konstruksi perkara, Brigjen Lalu Iwan diduga memiliki peran penting dalam pengadaan logistik penunjang program MBG. Saat menjabat Kepala Biro Hukum dan Humas BGN pada 2025, ia diduga meminta dua saksi berinisial YCS dan RD mendirikan sebuah perusahaan untuk menjadi pemasok tunggal wadah makanan atau food tray bagi calon mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Menurut penyidik, perusahaan tersebut digunakan untuk mengendalikannya penjualan food tray kepada para mitra. Harga ditentukan secara sepihak dan di dalamnya diduga terdapat komponen keuntungan atau fee yang menjadi syarat agar calon mitra memperoleh persetujuan dari BGN.

Sementara itu, Kolonel Cpl BU diduga berperan sebagai Pejabat

Pembuat Komitmen (PPK) dalam sejumlah pengadaan barang penunjang, termasuk proyek pengadaan sepeda motor. Atas dugaan perbuatannya, Brigjen Lalu Iwan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a, huruf b, dan huruf e Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto ketentuan dalam KUHP.

TNI Hormati Proses Hukum

Keterlibatan seorang prajurit aktif dalam perkara ini langsung mendapat respons dari Markas Besar TNI.

Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen Muhammad Nas menegaskan institusinya menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.

"TNI mengedepankan asas praduga tak bersalah dan menyerahkan proses pembuktian kepada aparat penegak hukum. Apabila benar terdapat prajurit TNI aktif yang diduga terlibat, TNI akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung," ujarnya.

Penetapan Brigjen Lalu Iwan

merupakan pengembangan dari perkara yang mulai terungkap pada awal Juni 2026.

Sehari setelah Presiden Prabowo Subianto mencopot pimpinan BGN dengan alasan persoalan kedisiplinan serta tata kelola kualitas makanan, Kejaksaan Agung menetapkan tiga pejabat puncak BGN sebagai tersangka.

Mereka adalah mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala BGN Brigjen Polisi Sony Sonjaya, serta mantan Wakil Kepala BGN Mayjen TNI (Purn) Lodewyk Pusung. Penyidik kemudian menetapkan tiga tersangka lain dari unsur swasta dan yayasan, yakni Asep Yusuf Somantri, Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal Andri Mulyono, serta Ketua Yayasan Indonesia Food Security Review Glory Harimas Sihombing.

Menurut Kejaksaan, para tersangka diduga mengatur proses verifikasi dan penunjukan mitra SPPG sehingga yayasan yang terafiliasi dengan mereka memperoleh proyek pengelolaan program MBG.

Selain itu, penyidik menemukan dugaan penyimpangan dalam peng-

adaan sejumlah barang penunjang yang nilainya mencapai triliunan rupiah. Di antaranya pengadaan sekitar 21.801 unit sepeda motor listrik senilai sekitar Rp1 triliun, 32.000 pasang sepatu lapangan, 31.000 unit tablet, hingga sekitar 5.400 televisi berukuran 75 inci. (wid,ist,rls,kum,bbc/dya)

Modus Operandi

- Mendirikan perusahaan boneka sebagai pemasok tunggal wadah makanan.
- Menetapkan harga ompreng secara sepihak.
- Menahan izin operasional SPPG agar mitra wajib membeli ompreng dari perusahaannya.
- Mengambil keuntungan (fee) dari setiap pembelian untuk kepentingan pribadi.

Jerat Pasal

- Pasal 12 huruf a, huruf b, dan huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun Juncto (jo.) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).



Riset CORE: MBG dan Kopesdes Merah Putih Bikin Fiskal 367 Daerah Tertekan

Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia menilai kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat untuk mendanai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) berdampak besar terhadap kondisi keuangan pemerintah daerah.

Pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) di tengah bertambahnya beban pembiayaan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dinilai membuat ratusan kabupaten menghadapi tekanan fiskal.

Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet menyebut sedikitnya 367 dari 415 kabupaten berada dalam kondisi fiskal yang kritis. Menurutnya, daerah harus menghadapi dua tekanan sekaligus, yakni berkurangnya transfer dari pemerintah pusat dan kewajiban membiayai gaji PPPK sesuai amanat Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).

"Beban atau tambahan mandat baru ditambah. Daerah diberikan tanggung jawab untuk mendanai gaji PPPK, tetapi anggarannya tidak disesuaikan," ujar Yusuf dalam

diskusi publik di kantor CORE Indonesia, Jakarta, Kamis (2/7).

Dalam riset bertajuk Megap-megap Keuangan Daerah, CORE menyebut pemerintah kembali memangkas anggaran TKD pada 2026 sebagai bagian dari efisiensi untuk mendukung program strategis nasional, termasuk MBG dan KDMP.

CORE mencatat pagu TKD nasional turun menjadi Rp693 triliun, yang disebut sebagai level terendah dalam dua dekade terakhir. Di saat bersamaan, pendapatan asli daerah (PAD) secara nasional juga mengalami penurunan sebesar 20,1 persen. Kondisi itu membuat pertumbuhan pendapatan daerah merosot tajam dari minus 3,1 persen menjadi minus 31,9 persen.

Tekanan fiskal semakin berat setelah pemerintah pusat menghapus alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) khusus penggajian PPPK yang pada 2025 mencapai Rp15,36 triliun. Akibatnya, pemerintah daerah harus menanggung sendiri beban penggajian ratusan ribu PPPK yang direkrut pada 2024-2025.

CORE memperkirakan 367 kabupaten atau sekitar 88 persen dari total 415 kabupaten akan

kesulitan memenuhi ketentuan batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen ketika aturan tersebut diberlakukan penuh pada 2027.

Sejumlah daerah bahkan mulai mengalami kesulitan membayar gaji pegawai.

Yusuf mencontohkan Kabupaten Cirebon yang disebut tidak mampu menanggung belanja pegawai sehingga berharap pembiayaan tersebut dapat diambil alih pemerintah pusat.

Kondisi serupa juga terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Keterbatasan ruang fiskal membuat sekitar 9.000 dari 12.000 tenaga PPPK di provinsi tersebut disebut berada dalam ancaman pemutusan kontrak kerja.

Untuk menutupi kekurangan anggaran, sejumlah pemerintah daerah mulai menaikkan pajak daerah. CORE menilai langkah ini berpotensi memicu gejolak di masyarakat. Salah satu contohnya terjadi di Kabupaten Pati, ketika kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen memicu penolakan warga. (tin,rls/dya)

DOKTER TIFA TOLAK RESTORATIVE JUSTICE

Sidang perdana perkara dugaan penyebaran berita bohong, fitnah, dan pencemaran nama baik terkait isu ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (2/7/2026). Dalam persidangan tersebut, terdakwa Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa menegaskan tidak akan menempuh penyelesaian melalui mekanisme restorative justice.

Di hadapan majelis hakim, Dokter Tifa menyatakan akan menghadapi seluruh proses hukum yang berjalan.



"Pertama, saya tidak akan melakukan restorative justice. Kedua, saya akan melakukan perlawanan. Ketiga, saya tidak akan menerima plea bargain (negosiasi pengakuan bersalah)," tegas dr. Tifa usai sidang.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa dr. Tifa dengan sejumlah pasal berlipis terkait dugaan fitnah, pencemaran nama baik, hingga pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE).

Dalam dakwaan primer, jaksa menyebut dr. Tifa diduga menyerang kehormatan atau nama baik Joko Widodo melalui pernyataan yang disebarluaskan menggunakan sarana teknologi informasi.

"Dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, diberi kesempatan membuktikan kebenaran hal yang dituduhkan tetapi tidak dapat

membuktikannya, dan tuduhan tersebut bertentangan dengan yang diketahuinya, jika dilakukan dengan sarana teknologi informasi," demikian salah satu bagian dakwaan yang dibacakan jaksa.

Jaksa menguraikan perkara bermula pada 26 Maret 2025 ketika ajudan Presiden, Syarif Muhammad Fitriansyah, menemukan tiga unggahan media sosial yang menuding ijazah Jokowi palsu. Salah satunya berasal dari akun X milik dr. Tifa yang diunggah pada 20 Maret 2025.

Temuan tersebut kemudian dilaporkan kepada Joko Widodo yang selanjutnya meminta tim kuasa hukumnya mengumpulkan seluruh unggahan serupa.

Pada 14 April 2025, tim kuasa hukum Jokowi menggelar konferensi pers dan menegaskan tuduhan ijazah palsu tidak benar. Sehari kemudian, Wakil Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof. Wening Udasmoro juga menyampaikan bahwa Jokowi merupakan lulusan Fakultas Kehutanan UGM yang menyelesaikan studi pada 5 November 1985.

Dalam surat dakwaan disebutkan Joko Widodo tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM sejak 28 Juli 1980, menyelesaikan 160 SKS, dan memperoleh ijazah Sarjana Kehutanan pada 5 November 1985.

Jaksa juga mengungkapkan hasil penelusuran menemukan sedikitnya 28 unggahan yang menuding ijazah Jokowi palsu, termasuk lima unggahan milik dr. Tifa.

"Bahwa perbuatan terdakwa merupakan pernyataan yang mengandung muatan tuduhan yang tidak benar. Mengingat Universitas Gadjah Mada telah menegaskan secara resmi bahwa saksi Ir. H. Joko Widodo adalah lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada sesuai dengan fakta akademik, namun terdakwa tetap menuduhkan bahwa ijazah S-1 saksi Ir. H. Joko Widodo adalah palsu melalui unggahan di media sosial dan talk show," kata jaksa.

Jaksa juga menyatakan terdakwa tidak mampu membuktikan tuduhan tersebut.

"Bahwa atas tuduhan terdakwa terhadap saksi Ir. H. Joko Widodo, terdakwa tidak dapat membuktikan tuduhannya dan tuduhan tersebut bertentangan dengan apa yang diketahui terdakwa sehingga perbuatan terdakwa merupakan serangan terhadap kehormatan saksi Ir. H. Joko Widodo dengan menggunakan sarana teknologi informasi," lanjut jaksa. (gus,ist,tmo/dya)

TIMELINE KASUS DOKTER TIFA VS JOKOWI

9 Juli 2026 (Agenda Berikutnya)

- o Sidang dilanjutkan; Jokowi direncanakan hadir pada tahap pembuktian untuk menunjukkan ijazah asli.

2 Juli 2026

- o Sidang perdana ditunda karena polemik salinan dakwaan.

23 Juni 2026

- o Berkas dilimpahkan ke PN Jakarta Timur.

22 Juni 2026

- o Dilimpahkan ke Kejaksaan, keduanya tidak ditahan.

19 Juni 2026

- o Keduanya ditangkap, berkas perkara dinyatakan lengkap (P21).

November 2025

- o Dokter Tifa dan Roy Suryo ditetapkan sebagai tersangka.

20 Mei 2025

- o Jokowi memberi klarifikasi kepada penyidik di Bareskrim Polri.

26 Maret 2025

- o Jokowi meminta kuasa hukum mengumpulkan bukti unggahan yang dianggap mencemarkan nama baik.

20 Maret 2025

- o Dokter Tifa mengunggah tuduhan ijazah S1 Jokowi palsu di X dan mendesak UGM mengusutnya.



KUASA hukum Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Yakup Hasibuan, memastikan kliennya siap menghadiri persidangan lanjutan perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik dengan terdakwa Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Pernyataan itu disampaikan Yakup usai sidang perdana Dokter Tifa, Kamis (2/7/2026).

Menurutnya, Jokowi telah menyatakan kesediaannya untuk hadir secara langsung di persidangan.

"Kemarin, per kemarin kami juga baru bertemu langsung dengan Pak Jokowi juga dan beliau menyatakan

Pengacara: Jokowi Siap Hadiri Sidang, Bawa Seluruh Ijazah

siap untuk hadir," kata Yakup.

Yakup mengatakan kehadiran Jokowi sekaligus menjadi bentuk penghormatan terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Dalam persidangan nanti, Jokowi juga siap memperlihatkan ijazah aslinya di hadapan majelis hakim.

"Tentunya itu merupakan penghormatan beliau dapat menunjukkan ijazahnya di forum yang sangat terhormat ini dan forum yang valid," ujarnya.

Ia menjelaskan, selama ini Jokowi kerap menjadi sasaran berbagai tuduhan mengenai keaslian ijazahnya. Karena itu, pihaknya menyambut kesempatan untuk membuktikan langsung dokumen tersebut melalui proses persidangan.

"Dan sekarang kami mendapatkan kesempatan untuk menghadirkan ijazahnya di forum yang terhormat ini dan Pak Jokowi sangat menghormati itu dan sangat

menunggu waktu itu nanti," lanjut Yakup.

Menurut Yakup, ijazah SMA dan Sarjana Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) milik Jokowi saat ini telah disita sebagai barang bukti dalam perkara tersebut. Nantinya, jaksa penuntut umum akan menghadirkan dokumen itu bersamaan dengan kehadiran Jokowi sebagai pelapor.

"Yes betul, karena ijazah yang sudah disita itu kan SMA dan UGM, jadi nanti tentu penuntut umum juga akan menghadirkan itu dan Pak Jokowi akan memperlihatkan itu semua."

Tak hanya itu, Yakup mengungkapkan Jokowi juga berencana membawa ijazah SD dan SMP agar polemik mengenai riwayat pendidikannya benar-benar berakhir.

"Dan lebih dari itu lagi ijazah SD dan SMP-nya pun berencana akan dibawa juga agar tidak ada lagi yang memperlmasalahkan." (wid ist/dya)